



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR TABEL..... II

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud Dan Tujuan..... 7

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
 Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 9

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat
 Daerah..... 25

 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26

 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 46

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46

 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 54

 3.3. Program Dan Kegiatan 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH73

BAB V PENUTUP..... 74



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Kabupaten Kapuas Hulu 10

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas
Hulu..... 21

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu 27

Tabel 4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu 43

Tabel 5 Rumusan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025..... 57



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut, Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan harapan dapat mengoptimalkan hasil kinerja aparatur yang profesional dan akuntabel sejalan dengan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.



1.2. Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta



- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi



- Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
25. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 memuat berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur yang merupakan dokumen pembangunan untuk Tahun Anggaran 2025.

Tujuan Renja yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah “sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan”. Rencana Kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan bahan pembahasan untuk dijadikan RKPD Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan



1.4. Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V.PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :



Tabel 1
Matrik Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang g Urusan/Progr am/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Berjalan (n-1) yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara n Renstra Perangk at Daerah s/d tahun 2024 dalam (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ungjawa b
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+ 12		14=7+13		15=14/6 *100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP (Predikat)	B	103.695.288.292,00	B	45.681.061.137,00	B	18.474.149.600,00	-	3.534.537.783,00	-	4.643.451.986,00	-	4.955.063.755,00			0,00	13.133.053.524,00	0,00	58.814.114.661,00	-	56,72	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 0,0 0	239.019.700,00	99,37	164.469.700,00	10 0	24.850.000,00	0,00	0,00	32,84	8.160.000,00	0,00	0,00		32,84	8.160.000,00	66,10	172.629.700,00	66,10	72,22	DPUPR
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase (%) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 0,0 0	51.477.678.893,00	93,12	19.795.604.358,00	10 0	7.873.204.292,00	24,35	1.916.833.843,00	30,90	2.432.626.436,00	25,06	1.973.138.177,00		80,31	6.322.598.456,00	86,71	26.118.202.814,00	86,71	50,74	DPUPR
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase (%) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10 0,0 0	106.166.700,00	99,42	88.646.700,00	10 0	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49,71	88.646.700,00	49,71	83,50	DPUPR
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 0,0 0	2.741.445.101,00	83,94	888.906.101,00	10 0	606.013.000,00	10,47	63.435.200,00	9,99	60.541.164,00	23,36	141.537.255,00		43,81	265.513.619,00	63,88	1.154.419.720,00	63,88	42,11	DPUPR

12



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	7.338.663.061,00	97,86	3.016.968.061,00	100	1.440.565.000,00	6,50	93.617.103,00	9,58	138.002.779,00	33,91	488.506.604,00		49,99	720.126.486,00	73,92	3.737.094.547,00	73,92	50,92	DPUPR
10	Meningkatnya Keterseediaan Air Untuk Irigasi	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (KM)	45,27	23.219.810.433,00	40,84	9.817.673.033,00	1,92	5.227.371.000,00	0,00	92.965.000,00	0,00	262.560.000,00	0,00	1.116.788.909,00		0,00	1.472.313.909,00	40,84	11.289.986.942,00	90,21	48,62	DPUPR
11	Meningkatnya Keterseediaan Air Untuk Irigasi	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang garis sungai rawan abrasi (KM)	0,98	2.551.481.244,00	0,63	2.151.481.244,00	0	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,63	2.151.481.244,00	64,62	84,32	DPUPR
12	Meningkatnya Keterseediaan Air Untuk Irigasi	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara (Ha)	695	20.668.329.189,00	315,35	7.666.191.789,00	192,95	4.927.371.000,00	0,00	92.965.000,00	0,00	262.560.000,00	0,00	1.116.788.909,00		0,00	1.472.313.909,00	315,35	9.138.505.698,00	45,35	44,22	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

			(Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta																						
1 3	Mening katnya Layana n Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	1.03. 03	PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah (KK) Rumah Tangga yang Mendapat kan Akses Air Minum	52 20 7	60.990.0 82.000,0 0	50 10 7	28.514.7 13.000,0 0	80 0	12.183.9 65.000,0 0	0, 00	123.390 .000,00	0, 00	2.567.75 7.500,00	0, 00	4.568.16 2.700,00			0, 00	7.259.31 0.200,00	501 07	35.774.0 23.200,0 0	95, 98	58 ,6 6	DPUPR
1 4	Mening katnya Layana n Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	1.03. 03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah (SR) Rumah yang Mendapat kan Akses Air Minum	52 20 7	60.990.0 82.000,0 0	50 78 7	28.514.7 13.000,0 0	12 0	12.183.9 65.000,0 0	0, 00	123.390 .000,00	0, 00	2.567.75 7.500,00	0, 00	4.568.16 2.700,00			0, 00	7.259.31 0.200,00	50.7 87,0 0	35.774.0 23.200,0 0	97, 28	58 ,6 6	DPUPR
1 5	Mening katnya Layana n Akses Sanitasi Layak	1.03. 05	PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBAN GAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah (KK) Rumah tangga yang memperol eh layanan pengolaha n air limbah domestik	42 52 2	33.532.5 02.350,0 0	41 92 2	9.567.09 8.350,00	20 0	8.042.62 6.000,00	0, 00	17.020. 000,00	0, 00	1.954.36 0.250,00	0, 00	3.432.28 1.450,00			0, 00	5.403.66 1.700,00	419 22	14.970.7 60.050,0 0	98, 59	44 ,6 5	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

16	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik (KK)	4252	33.532.502.350,00	41682	9.567.098.350,00	440	8.042.626.000,00	0,00	17.020.000,00	0,00	1.954.360.250,00	0,00	3.432.281.450,00		0,00	5.403.661.700,00	41.682,00	14.970.760.050,00	98,02	44,65	DPUPR
17	-	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang genangan air yang ditangani (KM)	14,08	3.253.673.190,00	10,02	2.049.238.190,00	3,307	793.520.000,00	0,00	0,00	0,00	57.340.000,00	0,00	25.410.000,00		0,00	82.750.000,00	10,02	2.131.988.190,00	71,18	65,53	DPUPR
18	-	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun (KM)	1,17	3.253.673.190,00	0,61	2.049.238.190,00	0,307	793.520.000,00	0,00	0,00	0,00	57.340.000,00	0,00	25.410.000,00		0,00	82.750.000,00	0,61	2.131.988.190,00	52,27	65,53	DPUPR
19	-	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya (%)	100,00	215.492.373.322,00	99,59	122.312.573.322,00	100	51.090.565.010,00	0,02	12.510.000,00	26,33	13.453.751.724,00	13,80	7.050.355.057,00		40,16	20.516.616.781,00	69,87	142.829.190.103,00	69,87	66,28	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

20	-	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang diselenggarakan (Bangunan Gedung)	44,00	215.492.373.322,00	22,00	122.312.573.322,00	11	51.090.565.010,00	0,00	12.510.000,00	0,00	13.453.751.724,00	0,00	7.050.355.057,00	0,01	20.516.616.781,00	22,01	142.829.190.103,00	50,02	66,28	DPUPR
21	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap (KM)	44,83	685.833.449.294,00	40,43	334.493.441.935,00	20	172.891.083.108,00	0,00	419.925.000,00	0,00	34.693.775.771,00	0,00	56.501.606.509,00	0,00	91.615.307.280,00	404,83	426.108.749.215,00	90,20	62,13	DPUPR
22	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditangani (KM)	77,00	685.833.449.294,00	33,00	334.493.441.935,00	20	172.891.083.108,00	0,00	419.925.000,00	0,00	34.693.775.771,00	0,00	56.501.606.509,00	0,00	91.615.307.280,00	33,00	426.108.749.215,00	42,86	62,13	DPUPR
23	Meningkatnya kualitas pelayanan	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Masyarakat (Score)	82,40	3.074.225.350,00	82,00	1.868.412.850,00	82,2	401.937.500,00	0,00	71.220.000,00	0,00	45.040.000,00	0,00	142.905.000,00	0,52	259.165.000,00	82,52	2.127.577.850,00	100,15	69,21	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	publik																							
24	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase (%) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,00	336.021.000,00	96,51	158.171.000,00	100	39.010.000,00	0,00	0,00	35,53	13.860.000,00	57,29	22.350.000,00		92,82	36.210.000,00	94,67	194.381.000,00	94,67	57,85	DPUPR
25	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	31.500.000,00	85,42	16.800.000,00	100	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42,71	16.800.000,00	42,71	53,33	DPUPR
26	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase (%) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100,00	266.832.000,00	85,14	206.172.000,00	100	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42,57	206.172.000,00	42,57	77,27	DPUPR
27	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase (%) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100,00	2.439.872.350,00	96,86	1.487.269.850,00	100	348.607.500,00	20,43	71.220.000,00	8,94	31.180.000,00	34,58	120.555.000,00		63,96	222.955.000,00	80,41	1.710.224.850,00	80,41	70,09	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

28	Meningkatnya ketataan terhadap Rencana tata Ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) (%)	83,00	3.106.297.345,00	80,45	1.572.887.345,00	81	502.820.000,00	0,00	28.965.000,00	0,00	95.750.000,00	0,00	134.670.000,00			0,00	259.385.000,00	80,45	1.832.272.345,00	96,93	58,99	DPUPR
29	Meningkatnya ketataan terhadap Rencana tata Ruang	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan (Dok.)	4,00	764.249.245,00	1,00	478.779.245,00	1	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1,00	478.779.245,00	25,00	62,65	DPUPR
30	Meningkatnya ketataan terhadap Rencana tata Ruang	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata (Dok.)	8,00	713.318.300,00	1,00	519.868.300,00	5	24.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.000,00			0,00	12.520.000,00	1,00	532.388.300,00	12,50	74,64	DPUPR
31	Meningkatnya ketataan terhadap Rencana tata Ruang	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Dok.)	3,00	296.890.000,00	0,00	0,00	1	99.950.000,00	0,00	0,00	0,00	67.460.000,00	0,00	32.330.000,00			0,00	99.790.000,00	0,00	99.790.000,00	0,00	33,61	DPUPR



3 2	Meningkatnya ketataan terhadap Rencana tata Ruang	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (Dokumen Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi)	4,00	1.331.839.800,00	1,00	574.239.800,00	1	217.920.000,00	0,00	28.965.000,00	0,00	28.290.000,00	0,00	89.820.000,00		0,00	147.075.000,00	1,00	721.314.800,00	25,00	54,16	DPUPR
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)																51,93					
			Predikat Kinerja																R					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) :																								



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :



Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator Kinerja		SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Akumulasi)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Predikat SAKIP	(Predikat)	-	-	B	B	B	B	B	0	B	B	
2	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(%)	-	-	99,37	99,68	99,84	99,92	99,37	0,00	99,68	99,60	
3	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(%)	-	-	93,12	96,56	98,28	99,14	93,12	0,00	96,46	95,58	
4	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	(%)	-	-	99,42	99,71	99,86	99,93	99,42	0,00	99,71	99,64	
5	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(%)	-	-	83,94	91,97	95,98	97,99	83,94	0,00	91,43	89,32	
6	Persentase Administrasi Umum	(%)	-	-	98,08	99,04	99,52	99,76	98,08	0,00	99,03	98,79	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	Perangkat Daerah												
7	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(%)	-	-	97,35	98,67	99,34	99,67	97,35	0,00	98,66	98,33	
8	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	-	-	98,91	99,46	99,73	99,86	98,91	0,00	99,45	99,32	
9	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	-	-	97,86	98,93	99,46	99,73	97,86	0,00	98,92	98,65	
10	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	(KM)	-	-	40,84	42,76	43,77	45,27	40,84	0,00	42,80	45,18	
11	Panjang garis sungai rawan abrasi	(KM)	-	-	0,63	0,63	0,63	0,98	0,63	0,00	0,63	2,34	
12	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	(Ha)	-	-	315,35	508,30	595,30	695,30	315,35	0,00	432,54	502,46	
13	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	(KK)	-	-	50107,00	50907,00	51557,00	52207,00	50107,00	0,00	51394,74	52026,15	
14	Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Air Minum	(SR)	-	-	50787,00	50907,00	51557,00	52207,00	50787,00	0,00	52092,22	52732,20	
15	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(KK)	-	-	41922,00	42122,00	42322,00	42522,00	41922,00	0,00	42321,05	42519,14	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

16	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	(KK)	-	-	41682,00	42122,00	42322,00	42522,00	41682,00	0,00	42078,76	42275,72	
17	Panjang genangan air yang ditangani	(KM)	-	-	10,02	13,33	13,53	14,08	10,02	0,00	10,32	11,29	
18	Panjang saluran drainase yang dibangun	(KM)	-	-	0,61	0,92	1,12	1,17	0,61	0,00	0,91	0,70	
19	Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya	(%)	-	-	99,59	199,59	299,59	399,59	99,59	0,00	224,38	236,31	
20	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	(Bangunan Gedung)	-	-	22,00	33,00	38,00	44,00	22,00	0,00	29,17	34,15	
21	Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap	(KM)	-	-	404,83	424,83	436,83	448,83	404,83	0,00	428,02	439,11	
22	Panjang Jalan Yang Ditangani	(KM)	-	-	33,00	53,00	65,00	77,00	33,00	0,00	49,64	54,86	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Score)	-	-	82,00	82,20	82,30	82,40	82,00	0,00	82,20	82,30	
24	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	(%)	-	-	96,51	98,26	99,13	99,56	96,51	0,00	98,23	97,79	
25	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(%)	-	-	85,42	92,71	96,35	98,18	85,42	0,00	92,27	90,36	
26	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil	(%)	-	-	85,14	92,57	96,28	98,14	85,14	0,00	92,11	90,16	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	dan Kecil)												
27	Persentase Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(%)	-	-	96,86	98,43	99,21	99,61	96,86	0,00	98,41	98,01	
28	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	(%)	-	-	80,45	81,00	82,00	83,00	80,45	0,00	82,45	83,43	
29	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	(Dok.)	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	0,00	2,25	2,37	
30	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	(Dok.)	-	-	1,00	6,00	7,00	8,00	1,00	0,00	1,36	1,49	
31	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	(Dok.)	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	0,00	2,25	2,37	
32	Persentase Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(Dok.)	-	-	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	0,00	2,25	2,37	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD yaitu :

- 1) Gambaran Pelayanan SKPD;
- 2) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3) Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Pada K / L;
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota dan;
- 5) Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD.

Maka ditentukan Isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Wilayah Yang Luas

Luasnya wilayah kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilayani oleh jalan kabupaten, sehingga tidak semua daerah dapat dilaksanakan pembangunannya.

2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis daerah membuat biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, sehingga diperlukan dana yang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan kabupaten.

3. Drainase di Perkotaan Belum Optimal



Masih minimnya prasarana saluran drainase/gorong-gorong perkotaan yang mengakibatkan adanya genangan air di beberapa tempat di wilayah perkotaan, sehingga pembangunan prasarana saluran drainase/gorong-gorong perlu dilakukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, dapat dilihat didalam dibawah ini :



Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kapuas Hulu

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024			
				RANCANGAN AWAL		RANCANGAN AKHIR	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4	5	6	7
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	(Predikat)	B	20.283.547.680,00	B	19.064.639.643,00
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(%)	100,00	89.550.000,00	100,00	24.850.000,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dok.)	8,00	25.250.000,00	8,00	5.700.000,00
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dok.)	1,00	9.750.000,00	1,00	3.525.000,00
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Dok.)	1,00	7.500.000,00	1,00	2.525.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Dok.)	1,00	9.750.000,00	1,00	3.525.000,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(Dok.)	1,00	7.500.000,00	1,00	2.525.000,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Laporan)	2,00	4.550.000,00	2,00	1.350.000,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Laporan)	4,00	25.250.000,00	4,00	5.700.000,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(%)	100,00	9.622.493.880,00	100,00	8.124.527.335,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang/bulan)	69,00	6.987.523.880,00	69,00	6.898.547.335,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dok.)	1,00	10.000.000,00	1,00	3.000.000,00
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Dok.)	1,00	2.554.120.000,00	1,00	1.206.220.000,00
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(Dok.)	1,00	16.800.000,00	1,00	1.500.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Laporan)	1,00	20.300.000,00	1,00	6.420.000,00
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	(Dok.)	1,00	8.000.000,00	1,00	2.000.000,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Laporan)	18,00	25.750.000,00	18,00	6.840.000,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	(%)	100,00	21.725.000,00	100,00	5.840.000,00
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Laporan)	1,00	21.725.000,00	1,00	5.840.000,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(%)	100,00	555.718.000,00	100,00	606.013.000,00
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(Paket)	-	-	1,00	70.250.000,00
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Dok.)	1,00	25.450.000,00	1,00	6.840.000,00
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(Orang)	30,00	530.268.000,00	30,00	528.923.000,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	(%)	100,00	3.567.764.920,00	100,00	3.028.077.100,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Paket)	1,00	56.985.000,00	1,00	49.210.000,00
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Paket)	1,00	495.000.000,00	1,00	293.430.000,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Paket)	1,00	67.709.600,00	1,00	56.371.600,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Paket)	1,00	123.237.500,00	1,00	124.987.500,00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	(Dok.)	1,00	49.200.000,00	1,00	134.700.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Laporan)	1,00	2.754.597.820,00	1,00	2.363.538.000,00
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Dok.)	1,00	21.035.000,00	1,00	5.840.000,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(%)	100,00	221.200.000,00	100,00	1.467.730.000,00
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(Unit)	2,00	74.000.000,00	2,00	1.118.880.000,00
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	(Unit)	-	-	-	-
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(Unit)	-	-	-	99.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	(Unit)	18,00	147.200.000,00	18,00	249.850.000,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	100,00	4.748.019.480,00	100,00	4.367.037.208,00
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Laporan)	1,00	20.000.000,00	1,00	30.000.000,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Laporan)	1,00	340.601.400,00	1,00	270.600.000,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(Laporan)	1,00	4.387.418.080,00	1,00	4.066.437.208,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	100,00	1.457.076.400,00	100,00	1.440.565.000,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Unit)	18,00	1.342.976.400,00	18,00	1.295.915.000,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Unit)	160,00	114.100.000,00	160,00	144.650.000,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	(KM)	41,34	1.520.000.000,00	-	5.229.624.598,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang garis sungai rawan abrasi	(KM)	-	280.000.000,00	-	400.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	(Danau)	-	-	-	-
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	(KM)	4,00	10.000.000,00	4,00	-
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	(KM)	0,20	20.000.000,00	-	-
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	(KM)	1,30	20.000.000,00	1,00	-
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	(KM)	0,00	200.000.000,00	-	400.000.000,00
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	(Unit)	1,00	10.000.000,00	1,00	-
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	(Unit)	2,00	20.000.000,00	2,00	-
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	(Ha)	-	1.240.000.000,00	-	4.829.624.598,00
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	(KM)	2,00	50.000.000,00	2,00	-
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	(KM)	3,00	500.000.000,00	3,00	3.976.820.198,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	(KM)	1,00	100.000.000,00	1,00	642.804.400,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	(KM)	4,00	100.000.000,00	4,00	210.000.000,00
1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	(KM)	6,00	400.000.000,00	6,00	-
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	(Dok.)	2,00	90.000.000,00	2,00	-
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	(KK)	50.907,00	930.000.000,00	-	11.184.965.000,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Air Minum	(SR)	-	930.000.000,00	-	11.184.965.000,00
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	(Unit)	2,00	30.000.000,00	2,00	7.083.000,00
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	(Orang)	200,00	90.000.000,00	200,00	40.010.000,00
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	(Dok.)	1,00	150.000.000,00	1,00	219.690.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	(Liter/Detik)	2 - 2,5	80.000.000,00	2,00	2.499.549.000,00
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	(Liter/Detik)	2 - 2,5	100.000.000,00	2,00	4.744.045.000,00
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	(Unit)	3,00	300.000.000,00	3,00	286.280.000,00
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	(SR)	1.000,00	180.000.000,00	1.000,00	3.388.308.000,00
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(SR)	-	30.000.000,00	-	-
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan	(KK)	-	30.000.000,00	-	-
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	(Ton/hari)	0,60	30.000.000,00	-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(KK)	42,12	340.000.000,00	-	7.988.626.000,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	(KK)	-	340.000.000,00	-	7.988.626.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	(Rumah Tangga)	400,00	150.000.000,00	400,00	7.668.826.000,00
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Orang)	200,00	90.000.000,00	200,00	43.800.000,00
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	276.000.000,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang genangan air yang ditangani	(KM)	-	280.000.000,00	-	1.161.165.000,00
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun	(KM)	0,30	280.000.000,00	-	1.161.165.000,00
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	(M)	500,00	10.000.000,00	500,00	-
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	(Meter)	6.000,00	200.000.000,00	6.000,00	-
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	(Sistem Drainase Lingkungan)	1,00	20.000.000,00	1,00	935.030.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	(Sistem Drainase Perkotaan)	7,00	20.000.000,00	7,00	-
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	(Sistem Drainase Perkotaan)	2,00	10.000.000,00	2,00	226.135.000,00
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	(Sistem Drainase Perkotaan)	3,00	20.000.000,00	3,00	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya	(%)	-	1.320.000.000,00	-	35.649.800.000,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki IMB di Daerah Kabupaten/Kota,	(%)	-	1.320.000.000,00	-	35.649.800.000,00
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	(Bangunan Gedung)	10,00	1.000.000.000,00	10,00	34.008.900.000,00
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	(Bangunan Gedung)	3,00	150.000.000,00	3,00	309.970.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	(Dok.)	1,00	30.000.000,00	1,00	15.200.000,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(Dok.)	3,00	90.000.000,00	3,00	1.240.000.000,00
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(Dok.)	100,00	50.000.000,00	100,00	75.730.000,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap	(KM)	763,24	6.880.000.000,00	-	152.675.880.746,00
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditangani	(KM)	19,00	6.880.000.000,00	-	152.675.880.746,00
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	377.856.980,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	(Dok.)	6,00	200.000.000,00	6,00	2.250.000.000,00
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	(KM)	2,00	200.000.000,00	2,00	2.726.451.375,00
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	(Jembatan)	4,00	400.000.000,00	4,00	2.218.185.000,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	(KM)	0,23	580.000.000,00	-	13.823.867.840,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	(KM)	0,50	1.100.000.000,00	-	121.207.965.645,00
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	(KM)	1,00	200.000.000,00	1,00	-
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	(Jembatan)	50,00	2.000.000.000,00	10,00	3.200.930.000,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	(Jembatan)	8,00	400.000.000,00	8,00	486.280.000,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	(Jembatan)	6,00	100.000.000,00	6,00	4.250.000.000,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	(KM)	1.106,15	100.000.000,00	1.106,00	800.000.000,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	(KM)	1,00	300.000.000,00	1,00	228.500.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	(KM)	20,00	1.200.000.000,00	4,00	1.105.843.906,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	(Score)	82,00	1.000.000.000,00	-	401.937.500,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	(%)	-	300.000.000,00	-	99.830.000,00
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	(Orang)	120,00	100.000.000,00	120,00	1.000.000,00
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	-
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	(Orang)	120,00	100.000.000,00	120,00	98.830.000,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(%)	-	200.000.000,00	-	4.900.000,00
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	(Orang)	2,00	100.000.000,00	2,00	4.900.000,00
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	(Layanan Informasi)	12,00	100.000.000,00	12,00	-



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	(%)	-	200.000.000,00	-	41.820.000,00
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	(Dok.)	5,00	100.000.000,00	5,00	41.820.000,00
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	-
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(%)	-	300.000.000,00	-	255.387.500,00
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	(Paket Pekerjaan)	100,00	100.000.000,00	100,00	124.532.500,00
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	(Lembaga)	22,00	100.000.000,00	22,00	100.055.000,00
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	(Badan Usaha)	-	-	5,00	30.800.000,00
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	-



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	(%)	81,00	1.000.000.000,00	-	502.820.000,00
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	(Dok.)	-	300.000.000,00	-	160.000.000,00
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	-
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	24.950.000,00
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	160.000.000,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	(Dok.)	-	250.000.000,00	-	24.950.000,00
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	(Dok.)	1,00	150.000.000,00	1,00	24.950.000,00
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	(Dok.)	1,00	100.000.000,00	1,00	-



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	(Dok.)	-	-	-	99.950.000,00
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	(Dok.)	-	-	-	-
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(Dok.)	-	450.000.000,00	-	217.920.000,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	(Dok.)	1,00	450.000.000,00	1,00	60.000.000,00
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	(Laporan)	-	-	1,00	157.920.000,00



2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	4	3	5	6
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	(Predikat)	DPUPR	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(%)	DPUPR	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	(Laporan)	DPUPR	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

		Realisasi Kinerja SKPD			
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Laporan)	DPUPR	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(%)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang/bulan)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Laporan)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(Laporan)	DPUPR	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	(%)	DPUPR	
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Laporan)	DPUPR	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(%)	DPUPR	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(Paket)	DPUPR	
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Dok.)	DPUPR	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(Orang)	DPUPR	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	(%)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Paket)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Paket)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Paket)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Paket)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Laporan)	DPUPR	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Dok.)	DPUPR	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(%)	DPUPR	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(Unit)	DPUPR	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	(Unit)	DPUPR	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(Unit)	DPUPR	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	(Unit)	DPUPR	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif yaitu :

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi dan telekomunikasi.
4. Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.



6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi :

1. Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besar seperti perkebunan, perusahaan HPH-HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan taman nasional dan hutan lindung;
2. Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut;
3. Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV : *high conservation value*) disetiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan mengenclave lahan pengusaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas;
4. Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum;



5. Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar dari pada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi;
6. Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda;
7. Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah;
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung;
9. Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;
10. Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya;



11. Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat;
12. Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan;
13. Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi :

1. Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimplikasi pada kajian mendalam dan terperinci;
2. Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya;
3. Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan *illegal*, khususnya *illegal logging*;



4. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat;
6. Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;
7. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi :

1. Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman;
2. Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro - minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro - minapolitan, yang dapat



- ditindak lanjutkan dengan pembuatan perda sebagai payung hukum;
3. Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro - mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi;
 4. Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai;
 5. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan;
 6. Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanannya, serta kegiatan industri turunannya;
 7. Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi;
 8. Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut;
 9. Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan - kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya;



10. Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang;
11. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi;
12. Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
13. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukkan industri.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi :

- 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan
- 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan
- 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan
- 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :



- 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sektor harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah.
- 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam
- 3) Program - program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi :

1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya;
2. Penetapan zona pengelolaan limbah domestik;
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
4. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA sistem sanitary landfill;
5. Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat pemukiman.
6. Pnaatan penerapan prosedur standar operasi TPA sistem sanitary landfill.
7. Disediakkannya sumur control disekitar kawasan TPA untuk mengetahui apakah air tanah disekiatar kawasan tidak atau telah tercemar.



Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi :

1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya.
2. Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di Kapuas Hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut : carbon sink, reservoir air, dan penyerap air lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor kunci keberhasilan organisasi. tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. dengan demikian, tujuan merupakan



penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selama 5 (Lima) tahun periode 2021-2026 juga disertai dengan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja Sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi.

3.3. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu maka ditunjang dengan adanya Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi SKPD. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ditunjang dengan 9 (Sembilan) program dan 23 (dua



puluh lima) kegiatan, yang masing-masing program dan kegiatan memiliki sasaran kinerja.



Tabel 5
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana tahun 2025			Prakiraan Maju tahun 2026			Catatan penting
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	Kab. Kapuas Hulu	B (Predikat)	19.064.639.643,00	DAU	B (Predikat)	19.064.639.643,00	DAU	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00 (%)	24.850.000,00	DAU	100,00 (%)	24.850.000,00	DAU	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	8,00 (Dok.)	5.700.000,00	DAU	- (Dok.)	5.700.000,00	DAU	
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00 (Dok.)	3.525.000,00	DAU	- (Dok.)	3.525.000,00	DAU	
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00 (Dok.)	2.525.000,00	DAU	- (Dok.)	2.525.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	3.525.000,00	DAU	-	(Dok.)	3.525.000,00	DAU	
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	2.525.000,00	DAU	-	(Dok.)	2.525.000,00	DAU	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2,00	(Laporan)	1.350.000,00	DAU	-	(Laporan)	1.350.000,00	DAU	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	4,00	(Laporan)	5.700.000,00	DAU	-	(Laporan)	5.700.000,00	DAU	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	7.924.187.335,00	DAU	100,00	(%)	7.924.187.335,00	DAU	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	67,00	(Orang/bulan)	6.898.547.335,00	DAU	-	(Orang/bulan)	6.898.547.335,00	DAU	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	3.000.000,00	DAU	-	(Dok.)	3.000.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	1.005.880.000,00	DAU	-	(Dok.)	1.005.880.000,00	DAU	
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	1.500.000,00	DAU	-	(Dok.)	1.500.000,00	DAU	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	6.420.000,00	DAU	-	(Laporan)	6.420.000,00	DAU	
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	2.000.000,00	DAU	-	(Dok.)	2.000.000,00	DAU	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	18,00	(Laporan)	6.840.000,00	DAU	-	(Laporan)	6.840.000,00	DAU	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	5.840.000,00	DAU	100,00	(%)	5.840.000,00	DAU	
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	5.840.000,00	DAU	-	(Laporan)	5.840.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	606.013.000,00	DAU	100,00	(%)	606.013.000,00	DAU	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Paket)	70.250.000,00	DAU	-	(Paket)	70.250.000,00	DAU	
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	6.840.000,00	DAU	-	(Dok.)	6.840.000,00	DAU	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kapuas Hulu	30,00	(Orang)	528.923.000,00	DAU	-	(Orang)	528.923.000,00	DAU	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	3.227.442.100,00	DAU	100,00	(%)	3.227.442.100,00	DAU	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Paket)	49.210.000,00	DAU	-	(Paket)	49.210.000,00	DAU	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Paket)	493.770.000,00	DAU	-	(Paket)	493.770.000,00	DAU	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Paket)	56.371.600,00	DAU	-	(Paket)	56.371.600,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Paket)	124.987.500,00	DAU	-	(Paket)	124.987.500,00	DAU	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	134.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	134.700.000,00	DAU	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	2.362.563.000,00	DAU	-	(Laporan)	2.362.563.000,00	DAU	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	5.840.000,00	DAU	-	(Dok.)	5.840.000,00	DAU	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	1.467.730.000,00	DAU	100,00	(%)	1.467.730.000,00	DAU	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Unit)	1.118.880.000,00	DAU	-	(Unit)	1.118.880.000,00	DAU	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	18,00	(Unit)	99.000.000,00	DAU	-	(Unit)	99.000.000,00	DAU	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	18,00	(Unit)	249.850.000,00	DAU	-	(Unit)	249.850.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	4.368.012.208,00	DAU	100,00	(%)	4.368.012.208,00	DAU	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	30.975.000,00	DAU	-	(Laporan)	30.975.000,00	DAU	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	270.600.000,00	DAU	-	(Laporan)	270.600.000,00	DAU	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	4.066.437.208,00	DAU	-	(Laporan)	4.066.437.208,00	DAU	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	1.440.565.000,00	DAU	100,00	(%)	1.440.565.000,00	DAU	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kapuas Hulu	18,00	(Unit)	1.295.915.000,00	DAU	-	(Unit)	1.295.915.000,00	DAU	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	160,00	(Unit)	144.650.000,00	DAU	-	(Unit)	144.650.000,00	DAU	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Kab. Kapuas Hulu	37,20	(KM)	426.800.000,00	DAU	2,50	(KM)	426.800.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang garis sungai rawan abrasi	Kab. Kapuas Hulu	0,35	(KM)	106.700.000,00	DAU	0,35	(KM)	106.700.000,00	DAU	
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	0,05	(KM)	106.700.000,00	DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	960,90	(Ha)	320.100.000,00	DAK-DAU	960,00	(Ha)	320.100.000,00	DAK-DAU	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAK-DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAK-DAU	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	Kab. Kapuas Hulu	650,00	(KK)	746.900.000,00	DAK-DAU	650,00	(KK)	746.900.000,00	DAK-DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	MINUM											
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses Air Minum	Kab. Kapuas Hulu	51557,00	(SR)	746.900.000,00	DAK-DAU	52207,00	(SR)	746.900.000,00	DAK-DAU	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Unit)	106.700.000,00	DAU	-	(Unit)	106.700.000,00	DAU	
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Kapuas Hulu	200,00	(Orang)	106.700.000,00	DAU	-	(Orang)	106.700.000,00	DAU	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Kapuas Hulu	2,00	(Liter/Detik)	106.700.000,00	DAK-DAU	-	(Liter/Detik)	106.700.000,00	DAK-DAU	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Kapuas Hulu	2,00	(Liter/Detik)	106.700.000,00	DAK-DAU	-	(Liter/Detik)	106.700.000,00	DAK-DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	-	(Unit)	106.700.000,00	DAU	-	(Unit)	106.700.000,00	DAU	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kapuas Hulu	650,00	(SR)	106.700.000,00	DAK-DAU	-	(SR)	106.700.000,00	DAK-DAU	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kab. Kapuas Hulu	200,00	(KK)	320.100.000,00	DAK-DAU	200,00	(KK)	320.100.000,00	DAK-DAU	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Kab. Kapuas Hulu	42322,00	(KK)	320.100.000,00	DAK-DAU	42522,00	(KK)	320.100.000,00	DAK-DAU	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kab. Kapuas Hulu	200,00	(KK)	106.700.000,00	DAK-DAU	-	(KK)	106.700.000,00	DAK-DAU	
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kapuas Hulu	200,00	(Orang)	106.700.000,00	DAU	-	(Orang)	106.700.000,00	DAU	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang genangan air yang ditangani	Kab. Kapuas Hulu	0,90	(KM)	213.400.000,00	DAU	0,90	(KM)	213.400.000,00	DAU	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun	Kab. Kapuas Hulu	1,16	(KM)	213.400.000,00	DAU	1,41	(KM)	213.400.000,00	DAU	
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Kab. Kapuas Hulu	-	(Sistem Drainase Lingkungan)	106.700.000,00	DAU	-	(Sistem Drainase Lingkungan)	106.700.000,00	DAU	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	-	(Sistem Drainase Perkotaan)	106.700.000,00	DAU	-	(Sistem Drainase Perkotaan)	106.700.000,00	DAU	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah penerbitan IMB yang sesuai dengan peruntukannya	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	533.500.000,00	DAU	100,00	(%)	533.500.000,00	DAU	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Kab. Kapuas Hulu	10,00	(Bangunan Gedung)	533.500.000,00	DAU	12,00	(Bangunan Gedung)	533.500.000,00	DAU	
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang	Kab. Kapuas Hulu	-	(Bangunan Gedung)	106.700.000,00	DAU	-	(Bangunan Gedung)	106.700.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	Kabupaten/Kota	Diubahsuaikan										
1.03.08.2.01.0018	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kab. Kapuas Hulu	-	(Bangunan Gedung)	106.700.000,00	DAU	-	(Bangunan Gedung)	106.700.000,00	DAU	
1.03.08.2.01.0019	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Kapuas Hulu	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	Kab. Kapuas Hulu	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

	dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	SIMBG										
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan pada status ruas jalan kondisi mantap	Kab. Kapuas Hulu	35,50	(KM)	1.280.400.000,00	DAK	37,00	(KM)	1.280.400.000,00	DAK	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Yang Ditangani	Kab. Kapuas Hulu	2,90	(KM)	1.280.400.000,00	DAK	2,80	(KM)	1.280.400.000,00	DAK	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Kab. Kapuas Hulu	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAK	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAK	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kab. Kapuas Hulu	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAK	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAK	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAK	-	(KM)	106.700.000,00	DAK	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Kab. Kapuas Hulu	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAU	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAU	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAK-DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAK-DAU	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kab. Kapuas Hulu	30,00	(Jembatan)	106.700.000,00	DAU	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAU	
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAU	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAU	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kab. Kapuas Hulu	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAK	-	(Jembatan)	106.700.000,00	DAK	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAK	-	(KM)	106.700.000,00	DAK	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	Kab. Kapuas	1,00	(KM)	106.700.000,00	DAU	-	(KM)	106.700.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

		Secara Rutin	s Hulu									
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu	82,30	(Score)	640.200.000,00	DAU	82,40	(Score)	640.200.000,00	DAU	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	213.400.000,00	DAU	100,00	(%)	213.400.000,00	DAU	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kab. Kapuas Hulu	40,00	(Orang)	106.700.000,00	DAU	-	(Orang)	106.700.000,00	DAU	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kab. Kapuas Hulu	40,00	(Orang)	106.700.000,00	DAU	-	(Orang)	106.700.000,00	DAU	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	106.700.000,00	DAU	100,00	(%)	106.700.000,00	DAU	
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu	2,00	(Orang)	106.700.000,00	DAU	-	(Orang)	106.700.000,00	DAU	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	-	DAU	100,00	(%)	-	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Kapuas Hulu	100,00	(%)	320.100.000,00	DAU	100,00	(%)	320.100.000,00	DAU	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kab. Kapuas Hulu	200,00	(Paket Pekerjaan)	106.700.000,00	DAU	-	(Paket Pekerjaan)	106.700.000,00	DAU	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kab. Kapuas Hulu	20,00	(Lembaga)	106.700.000,00	DAU	-	(Lembaga)	106.700.000,00	DAU	
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kab. Kapuas Hulu	20,00	(Badan Usaha)	106.700.000,00	DAU	-	(Badan Usaha)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	Kab. Kapuas Hulu	82,00	(%)	533.610.069,00	DAU	83,00	(%)	533.610.069,00	DAU	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	213.510.069,00	DAU	1,00	(Dok.)	213.510.069,00	DAU	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	-	(Dok.)	106.700.000,00	DAU	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kab. Kapuas Hulu	1,00	(Laporan)	106.810.069,00	DAU	-	(Laporan)	106.810.069,00	DAU	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Rencana Pendanaan Perangkat Daerah disusun berdasarkan hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Program RENJA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran yang telah ditetapkan didalam RENSTRA, sehingga antara visi dan misi tetap selaras.

Pagu indikatif adalah merupakan besaran rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif di alokasikan kesetiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan untuk isu-isu strategis adalah dengan menggunakan Dana ALokasi Umum (DAU) dan Dana ALokasi Khusus (DAK) tahun 2025 serta sumber dana lainnya.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani.

Penyusunan Rencana Kerja sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam pengambilan keputusan. Tingkat keberhasilan pembangunan di kabupaten Kapuas Hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Putussibau, Oktober 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu

MARTHEN,S.T.,M.T.
NIP. 19740923 200502 1 002